

HAMBATAN GERAKAN #METOO DI MEDIA SOSIAL DALAM MELAWAN KEKERASAN SEKSUAL DI TIONGKOK

Ristiara Cahya Gayatri¹

Abstract: *Sexual harassment is an act of coercion to rule over others that greatly harms its victim. Sexual harassment does not look at gender, men and women can experience sexual harassment but women are more vulnerable to experiencing it. Sexual harassment can also occur in any level of society regardless of social status. Sexual harassment is a heinous crime, victims can lose their lives or live by feeling the effects for life. Sexual harassment has become a violation related to human rights issues, so The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) comes into existence as an international law on women's rights initiated by the United Nations to protect women from discrimination. Even though prevention has been carried out, sexual harassment still occurs. Until the emergence of various anti-sexual harassment movements, such as the Me Too Movement which became one of the movements against sexual harassment from the United States founded by Tarana Burke since 2006. Until 2017 the Me Too Movement was better known as #MeToo when United States Actress Alyssa Milano revealed the sexual harassment she experienced against United States Film Producer Harvey Weinstein, the movement #MeToo inspired American women in fighting sexual harassment and the #MeToo movement began to spread in various countries through social media, such as France, Italy, England, India, Japan, South Korea and Tiongkok. #MeToo movement in Tiongkok is expected to bring hope to survivors of sexual harassment like in the United States, but the #MeToo movement in Tiongkok has encountered obstacles due to differences in state ideology, government response and patriarchal culture that has existed in Tiongkok society.*

Keywords: *#MeToo Movement, Patriarchy, Sexual Harassment, Tiongkok*

Pendahuluan

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan untuk berkuasa atas orang lain tanpa melihat jenis kelamin atau kelas sosialnya, namun perempuan lebih rentan mengalami kekerasan seksual. 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh pasangannya maupun non-pasangannya, sebanyak 6% perempuan di seluruh dunia telah melaporkan kekerasan fisik atau seksual yang mereka alami dari pasangan ataupun non-pasangannya dan jumlah tersebut dapat lebih tinggi mengingat rendahnya pelaporan kekerasan seksual dari para korbannya (WHO, 2021). Kekerasan seksual tidak hanya berupa perkosaan dan pelecehan seksual, namun dapat berupa ancaman perkosaan, prostitusi paksa, pemaksaan aborsi, sterilisasi paksa dan lain sebagainya. Diskriminasi terhadap perempuan telah diatur dalam *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah menjadi undang-undang internasional tentang hak-hak perempuan, yang memiliki tiga prinsip yaitu kesetaraan substantif, non-diskriminasi dan kewajiban negara (Sagala, R, 2020).

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : tiaraatiara88@gmail.com.

Rasa malu yang dirasakan akibat dari kekerasan seksual membuat korban memilih diam dan tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. *Me Too Movement* adalah salah satu gerakan melawan kekerasan seksual yang didasarkan pada keprihatinan terhadap banyaknya korban tidak memiliki tempat yang aman bahkan hanya sekedar untuk didengar. *Me Too Movement* didirikan pada tahun 2006 oleh Tarana Burke yang merupakan Aktivist dari Amerika Serikat. Hingga pada tahun 2017, *Me Too Movement* dikenal secara lebih luas dengan *#MeToo* saat pengungkapan kasus kekerasan seksual yang dialami Aktris Amerika Serikat Alyssa Milano terhadap Produser Film Amerika Serikat Harvey Weinstein. Keberanian Alyssa Milano menginspirasi banyak perempuan untuk melakukan hal yang sama dan menyebarkan informasi kepada orang lain agar mengetahui besarnya masalah tersebut (Saxena, 2018). Gambar 1 Tweet Alyssa Milano menggunakan *#MeToo* di twitter



Gerakan *#MeToo* sebagai upaya melawan kekerasan seksual tidak hanya ingin merubah pandangan korban untuk dapat melawan serta bersuara tentang kekerasan seksual, namun juga merubah pandangan masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Seperti adanya pembatasan terhadap *Non-disclosure Agreement* (NDA) pada kasus kekerasan seksual untuk menghindari pelaku melakukan tindak kejahatan secara berulang dan mencegah NDA membatasi gerak korban kekerasan seksual untuk melaporkan secara hukum pada enam negara bagian Amerika Serikat yaitu New York, Arizona, Washington, Maryland, Vermont dan Tennessee. Penyebaran gerakan *#MeToo* melalui media sosial telah menjangkau korban kekerasan seksual diberbagai negara, seperti Prancis, Italia, Inggris, India, Jepang, Korea Selatan hingga Tiongkok.

Menjadi salah satu negara penyebaran gerakan *#MeToo*, Tiongkok tidak terlepas dari permasalahan kekerasan seksual yang menimpa para perempuan. Berdasarkan survei kelompok kampanye *Anti-Sexual Harassment* (ATSH) oleh Sophia Huang, 80% perempuan telah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja berdasarkan 416 sampel dari 1.762 responden yang tersebar dalam 15 wilayah di Tiongkok (Yuqing, 2018). Pengaruh budaya patriarki yang kuat pada masyarakat Tiongkok membuat perempuan dirugikan, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah ada sejak masuknya ajaran konfusius yang membuat status perempuan harus tunduk terhadap ayah, suami dan anak laki-lakinya, sehingga menimbulkan pandangan terhadap perempuan yang dianggap inferior sedangkan laki-laki superior (P et al., 2018) kekerasan seksual tidak lagi terjadi pada tempat-tempat sepi, tempat umum seperti sekolah dan lingkungan kerja dapat disalahgunakan para pelaku kekerasan seksual.

Stigma yang telah ada pada masyarakat Tiongkok tentang ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan tidak sepenuhnya diabaikan oleh Tiongkok. CEDAW yang menjadi undang-undang tentang hak-hak perempuan secara internasional telah diratifikasi oleh Tiongkok dalam bentuk Undang-undang tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan tahun 1992. Mengalami amandemen sebanyak dua kali pada tahun 2005 dan

2018 yang menginginkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan implementasi dan amandemen Undang-undang tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan Tiongkok diharapkan dapat melindungi perempuan dari segala bentuk diskriminasi, namun kasus diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi di Tiongkok.

Masuknya gerakan #MeToo di Tiongkok melalui sosial media (weibo) menghasilkan kasus-kasus kekerasan seksual yang diawali pada Januari tahun 2018 dengan kasus kekerasan yang dialami Luo Xixi terhadap Chen Xiaowu yang berprofesi sebagai professor. Kemudian, kasus kekerasan Zhou Xiaoxuan atau Xianzi terhadap Zhu Jun yang menjadi momentum gerakan #MeToo di Tiongkok. Serta kasus kekerasan seksual yang dialami Peng Shuai terhadap Zhang Gaoli yang merupakan Wakil perdana menteri Tiongkok yang menjadi isu global karena menarik banyak media masa internasional dan kasus-kasus kekerasan lain yang terungkap melalui gerakan #MeToo di media sosial Tiongkok.

Gerakan #MeToo di Tiongkok dalam upaya membantu penyintas kekerasan seksual dalam melawan mengalami hambatan dari berbagai aspek. Permasalahan terkait kekerasan seksual menjadi urgensi dimana gerakan #MeToo yang telah menyebar diberbagai negara termasuk Tiongkok telah menjadi isu vokal di media sosial serta menjadi kampanye dalam gerakan sosial ini. Gerakan #MeToo menjadi harapan bagi perempuan Tiongkok untuk melakukan perlawanan terhadap kekerasan seksual.

Kerangka Teori

Teori Feminisme Liberal

Feminisme Liberal menurut Naomi Wolf memiliki asumsi dasar bahwa kebebasan dan kesetaraan merupakan hal yang berakar dari rasionalitas. Menurut feminisme liberal, alasan mendasar mengapa perempuan dapat tertindas dikarenakan kesalahan yang terbentuk oleh perempuan sendiri yang merasa tidak dapat bersaing dengan kaum laki-laki.

Feminisme liberal juga memiliki asumsi dasar lainnya yang menyangkut pandangan terhadap politik global dalam memandang isu gender dan perempuan. Adapun asumsi tersebut sebagai berikut :

- a. Feminisme liberal tidak menganggap *human nature* sebagai hal yang abadi, melainkan kapasitas manusia yang merupakan makhluk rasional menjadikan *human nature* sebagai konstruksi sosial.
- b. Mereka beranggapan tidak ada yang bisa membuat perbedaan yang signifikan antara fakta dan nilai.
- c. Adanya hubungan antara *knowledge* dan *power*

Oleh karena itu, dalam menjawab serta mendukung teori dalam penelitian ini, di dalam teori feminisme liberal terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan landasan (Sulaiman, 2014), indikator-indikator tersebut meliputi :

- a. Perempuan memiliki pilihan dan mampu berpikir secara individu serta rasional, sama seperti laki-laki.
 - b. Perempuan juga berhak untuk tidak menikah, bekerja dan merubah pribadinya menjadi lebih baik jika hal tersebut merupakan pilihan mereka.
- Adapun karakteristik dalam teori feminisme liberal (Thornman, 2010), yakni sebagai berikut :
- a. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama.

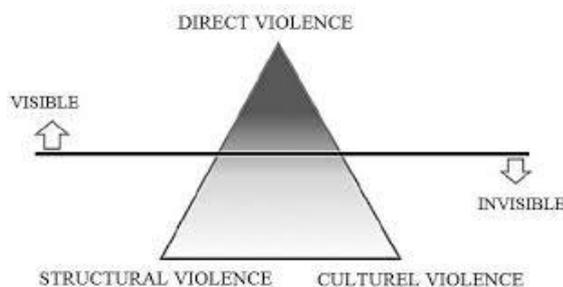
- b. Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang memiliki rasionalitas.
- c. Komitmen atas revolusi kaum perempuan dalam hal kesadaran guna membentuk kelompok pembebasan terhadap kaum perempuan.

Berdasarkan Asumsi, Indikator dan Karakteristik yang telah ditawarkan oleh kaum feminisme liberal diatas, implementasinya dalam Hubungan Internasional yaitu teori ini dirasa penulis dapat menjawab persoalan-persoalan yang hadir terhadap kaum perempuan. Adapun bentuk perlawanan teori feminisme liberal yaitu menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan yang dialami perempuan Tiongkok karena budaya patriarki membuat gerakan *#MeToo* hadir sebagai upaya perlawanan terhadap tindakan kekerasan seksual. Perbedaan nilai antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Tiongkok menempatkan perempuan pada posisi yang dirugikan. Sehingga Gerakan *#MeToo* di Tiongkok berupaya mencapai kesetaraan gender yang lebih menekankan pada derajat perempuan di kehidupan sosial.

Konsep Kekerasan Seksual

Menurut Johan Galtung kekerasan memiliki arti sebagai suatu kondisi bagi seseorang yang dapat mendominasi dan menghancurkan diri sendiri dan juga orang lain (Eriyanti, 2017). Konsep kekerasan dalam feminisme menurut Galtung dapat terlihat pada pengaruh budaya patriarki yang menciptakan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berdampak pada semua aspek kehidupan baik fisik dan psikologis (Sina et al., 2017).

Kekerasan menurut Galtung terbagi menjadi tiga kategori yang dikenal sebagai 'segitiga kekerasan' yakni sebagai berikut :



- a. Kekerasan Langsung, melihat kekerasan dapat terjadi jika ada pelaku dan korban yang terjadi secara fisik maupun verbal. Kekerasan langsung secara fisik seperti pembunuhan, pemukulan, perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya. Kekerasan langsung secara verbal seperti penghinaan.
- b. Kekerasan Struktural, melihat kekerasan bersumber dari ketimpangan struktur sosial dalam kehidupan manusia seperti adanya ketimpangan pendidikan, pendapatan dan sumber daya. Kekerasan struktural menyebabkan manusia mengalami berbagai situasi sulit dalam hidup dan dalam kekerasan struktural tidak ada pelaku yang dapat bertanggung jawab.
- c. Kekerasan Kultural, melihat kekerasan dapat terjadi karena pengaruh budaya dan ideologi.

Segitiga kekerasan menurut Galtung sangat berpengaruh satu sama lain. Kekerasan struktural dan kekerasan kultural menyebabkan kekerasan langsung, yang kemudian menciptakan pelaku kekerasan fisik juga verbal yang disebabkan oleh faktor struktur dan budaya. Kekerasan langsung juga memperburuk kekerasan struktural dan kultural (Makaarim, 2014).

Gerakan *#MeToo* di Tiongkok melihat konsep kekerasan oleh Galtung sebagai tanda bahwa kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya kekerasan langsung secara fisik seperti perkosaan dan secara verbal seperti penghinaan terhadap korban kekerasan. Kemudian, kekerasan seksual juga dapat terjadi karena kekerasan struktural seperti ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Tiongkok. dan kekerasan seksual yang terjadi karena budaya dan ideologi yang telah berkembang di Tiongkok seperti budaya patriarki dan ideologi pemerintah Tiongkok yang melihat perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menjelaskan bagaimana hambatan gerakan *#MeToo* yang berupaya melawan kekerasan seksual di Tiongkok dari tahun 2018 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan atau *Libarry research* berupa jurnal, artikel online dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan analisis secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Gerakan *#MeToo* di Tiongkok yang hendak mencapai tujuannya yaitu melakukan perlawanan terhadap kekerasan seksual di Tiongkok, pada bagian ini akan dibahas mengenai sejarah Gerakan *#MeToo* hingga hambatan bagi gerakan *#MeToo* di Tiongkok.

Sejarah Gerakan *#MeToo*

Tarana Janeen Burke adalah seorang Aktivis dari Amerika Serikat yang lahir di Bronx, New York pada 12 September 1973. Tarana Burke lahir dan tumbuh dari keluarga dalam lingkungan kelas pekerja Amerika Serikat yang membuatnya telah menjadi korban kekerasan seksual sejak usia remaja. Sebagai seorang penyintas, Tarana Burke memilih aktif dan bergerak bersama *21st Century* yang merupakan organisasi pemberdayaan pemuda yang mengatasi masalah terhadap diskriminasi rasial, ketidaksetaraan perumahan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat kulit hitam di Bronx, New York.

Tarana Burke sebagai Aktivis telah berkali-kali mendengar kisah memilukan dari para penyintas kekerasan seksual, salah satunya *Heaven* yang ditemuinya di Perkemahan musim panas pada tahun 1997 di Alabama, Amerika Serikat. Tarana burke mendengarkan pengakuan *Heaven* yang menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah tirinya, dalam waktu kurang dari lima menit Tarana Burke memotong pembicaraan *Heaven* dan meminta bantuan konselor lain di perkemahan yang dapat membantu *Heaven* lebih baik. Meskipun mendengar pengakuan *Heaven*, Tarana Burke tidak dapat mengatakan 'me too' atau 'saya juga' dan terus merasa bersalah karena tidak dapat membantu *Heaven* mengatasi kekerasan seksual yang dialaminya.

Pada tahun 2005, Tarana burke mendirikan organisasi non profit bernama *Just Be Inc* yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan gadis kulit hitam. *Just be Inc* bertujuan membantu gadis kulit hitam dari permasalahan terkait kekerasan seksual, pelecehan, eksploitasi dengan memberi ruang aman dan dukungan, program *Just Be Inc* mendapat respon baik dari masyarakat dan berhasil di adopsi sebagai sebuah program di sekolah umum di Selma, Alabama.

Satu tahun setelahnya pada tahun 2006, Tarana Burke juga mendirikan *Me Too Movement* sebagai gerakan melawan kekerasan seksual, *Heaven* adalah dasar dan inspirasi bagi Tarana Burke dalam pembentukan *Me Too Movement*. Sebagai seorang penyintas juga aktivis kekerasan seksual, Tarana Burke mendirikan *Me Too Movement* bukan karena dirinya adalah korban, namun juga karena keinginannya untuk merangkul dan memberikan dukungan kepada penyintas untuk memiliki keberanian dan kepercayaan diri dalam melawan kekerasan seksual '*Me Too*' was just two words: it's two magic words that galvanized the world yang digambarkan Tarana Burke sebagai makna dari *Me Too Movement* yang berupaya membantu penyintas kekerasan seksual dari perempuan kulit hitam, penyandang disabilitas, queer, transgender dan semua komunitas kulit berwarna (Burke, n.d.)

Hingga Oktober tahun 2017, Alyssa Milano yang merupakan aktris asal Amerika Serikat menggunakan *#MeToo* pada media sosial twitter dan menjadi trending. Alyssa Milano mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya terhadap seorang produser film bernama Harvey Weinstein. Alyssa Milano baru memiliki keberanian setelah 25 tahun bungkam atas kejadian tersebut, Alyssa Milano menjadi korban kekerasan seksual saat berperan dalam sebuah serial televisi berjudul '*who's the boss?*'. Dalam wawancaranya dengan *The View*, Alyssa Milano mengungkapkan ketakutannya dan rasa tidak berdaya setelah mengalami kekerasan seksual di lokasi syuting. Alyssa Milano bungkam karena khawatir terhadap tanggapan masyarakat ketika mencoba melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Tuduhan kekerasan seksual terhadap Harvey Weinstein berhasil membuatnya dipecat dari perusahaan *film Academy of Motion Picture* serta mendapatkan gugatan cerai dari istrinya, Georgina Chapman. Alyssa Milano juga mengajak para penyintas kekerasan seksual untuk turut serta dengan membalas tweetnya menggunakan *#MeToo* di Twitter. Alyssa Milano sebelumnya merasa takut dan sendiri setelah mengalami kekerasan seksual, melalui gerakan *#MeToo* Alyssa Milano mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak melalui media sosial dan telah berhasil menghukum Harvey Weinstein. Beberapa aktris dan penyanyi juga turut serta dalam gerakan *#MeToo* setelah Alyssa Milano, seperti Lady Gaga, Anna Paquin, Barry Crimmins serta Gwyneth Paltrow dan Cara Delevigne yang juga korban dari Harvey Weinstein.

Kekerasan Seksual adalah salah satu kejahatan paling keji, korban dapat kehilangan nyawa atau hidup dengan merasakan dampak tersebut seumur hidup. Tidak hanya terjadi secara langsung, siapa pun dapat mengalami pelecehan seksual melalui media sosial dengan ejekan seksis. Seseorang dapat mengalami kejadian traumatik oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenalnya melalui media sosial. Gerakan *#MeToo* melihat dampak yang ditimbulkan oleh pelaku kekerasan seksual sangat merugikan korban. Aksi yang dilakukan oleh Alyssa Milano adalah bentuk dari kembalinya keberanian dan rasa percaya diri seorang penyintas. Banyaknya respon dari tweet Alyssa Milano membuat gerakan *#MeToo* melalui media sosial tidak hanya menyebar di Amerika Serikat, beberapa negara lain di dunia juga ikut merasakan dampaknya karena semakin banyak penyintas yang berani bersuara dan mengungkapkan kejadian traumatik yang dialami melalui *#MeToo*.

Gambar Website *Me Too Movement*

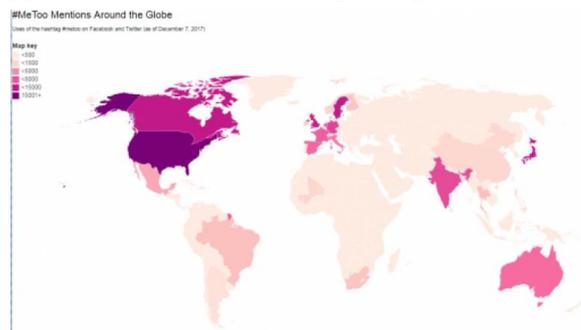
Gerakan *#MeToo* di media sosial berkembang pesat menjangkau orang-orang di luar Amerika Serikat untuk bergabung, menyuarakan juga mendukung perlawanan terhadap segala bentuk kekerasan seksual, setelah dikenal secara luas pada tahun 2017, Tarana Burke memanfaatkan momentum tersebut dengan membuat website *Me Too Movement* yang dapat diakses melalui <https://metoomvmt.org/>. website *Me Too Movement* menawarkan pilihan bagi pendukung maupun penyintas seperti informasi terkait organisasi-organisasi yang berfokus pada kekerasan seksual dan terlibat dalam mendukung gerakan *#MeToo*. Kemudian, informasi terkait mitra-mitra gerakan *#MeToo* di Amerika Serikat. Lalu, informasi yang berisikan panduan bagi pendukung untuk menolong penyintas disekitarnya. Kemudian, informasi yang berisikan panduan dalam mendukung penyintas kekerasan seksual dalam berbagai cara yang telah ditawarkan dan lain sebagainya.

Gerakan *#MeToo* telah mengalami perkembangan yang pesat melalui bantuan media sosial, tidak hanya diperkenalkan secara lebih luas melalui website, *#MeToo* juga telah menyebar diberbagai platform media sosial. Gerakan *#MeToo* di Twitter dapat diakses dengan nama akun @MeTooMVMT, Instagram dengan nama akun @metoomvmt, Facebook hingga Youtube dengan nama chanel @MeTooMovementOfficial. Melalui media sosial, para penyintas dan para pendukung gerakan *#MeToo* saling terhubung walaupun mengalami perbedaan jarak dan waktu. Media sosial berperan penting dalam mencapai tujuan dari gerakan *#MeToo* yaitu sebagai wadah aman bagi penyintas untuk bersuara, melawan dan mengakhiri kekerasan seksual.

Gerakan *#MeToo* di berbagai negara

Viralnya tweet *#MeToo* milik Alyssa Milano yang mengajak penyintas kekerasan seksual bersyara bersama gerakan *#MeToo* membuat banyaknya keikutsertaan penyintas dari berbagai negara tidak hanya dari Amerika Serikat dengan harapan dapat membawa perubahan dan keadilan .

Gambar Penggunaan *#MeToo* diberbagai negara



Twitter, Facebook, Instagram hingga youtube adalah media sosial yang paling banyak digunakan gerakan *#MeToo* dengan dominasi penggunaan tweet menggunakan Bahasa Inggris. Penyebaran *#MeToo* di berbagai negara juga menghasilkan tagar baru dari berbagai Bahasa.

Prancis menjadi salah satu negara yang ikut merasakan dampak dari gerakan *#MeToo*. Momentum masuknya gerakan *#MeToo* di Prancis melalui pengungkapan kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang jurnalis perempuan bernama Sandra Muller yang menggunakan *#MeToo* pada *tweet* yang berisikan tuduhan pelecehan seksual terhadap seorang eksekutif televisi bernama Eric Brion. Viralnya *tweet* milik Sandra Muller membuat para perempuan Prancis ikut serta bersuara atas kekerasan seksual yang dialami, *#MeToo* di Prancis juga dikenal dengan *#balancetonporc*. Eric Brion meminta maaf kepada Sandra Muller namun juga melaporkannya atas tuduhan pencemaran nama baik dengan menuntut biaya ganti rugi. Eric Brion membela diri dengan menyebut aksi yang dilakukannya bukanlah pelecehan melainkan rayuan terhadap Sandra Muller. *#Balancetonporc* sebagai upaya melawan kekerasan seksual di Prancis atas budaya permisif yang berkembang pada masyarakat Prancis. Gerakan *#MeToo* maupun *#balancetonporc* mengalami penolakan karena dianggap sebagai budaya puritanisme dan salah seorang aktris Prancis bernama Cathrine Deneuve mengecam gerakan *#MeToo* sebagai sebuah ancaman kebebasan seksual dan gerakan *#MeToo* bukanlah gerakan feminis melainkan kebencian berebih terhadap laki-laki (Collins, 2018).

Italia juga menjadi negara yang merasakan dampak gerakan *#MeToo*. Ramainya media sosial Italia karena terungkapnya kasus-kasus kekerasan seksual pada komunitas film melalui gerakan *#MeToo* menimbulkan diskusi-diskusi dan kesadaran terkait kekerasan seksual dengan munculnya tuduhan terhadap pelaku dengan membuka identitasnya. Gerakan *#MeToo* di Italia juga dikenal dengan *#quellavoltache*. Salah satu kasus yang terungkap adalah kasus yang dilaporkan Mirina Trevisian yang telah menjadi korban kekerasan seksual oleh Sutradara asal Italia bernama Giuseppe Tornatore. Gerakan *#MeToo* di Italia menghasilkan publikasi manifesto *Dissenso Comune* yang ditanda tangani oleh 124 aktris, produser dan sutradara sebagai dukungan bagi perempuan-perempuan Italia dalam melawan kekerasan seksual (Falciani, 2023). Namun, gerakan *#MeToo* di Italia mengalami hambatan karena adanya budaya seksisme di masyarakat Italia.

Kemudian negara yang ikut merasakan dampak dari gerakan *#MeToo* adalah Inggris. Kasus kekerasan seksual aktor Inggris Anthony Rapp yang dilakukan oleh aktor Inggris Kevin Spacey menjadi momentum masuknya gerakan *#MeToo* di media sosial. Anthony Rapp menjadi wajah baru bagi gerakan *#MeToo* karena ia adalah seorang laki-laki dan membuktikan bahwa kekerasan seksual juga dapat dialami oleh laki-laki. Gerakan *#MeToo* di Inggris berhasil meningkatkan pelaporan terhadap tindak kekerasan seksual dan adanya aksi solidaritas pengumpulan dana yang melibatkan aktris Inggris seperti Emma Watson. Dana sebesar 1 juta Euro yang terkumpul didonasikan kepada organisasi perempuan Inggris seperti *Whels Woman Aid* dan *London Black Women Project* (Bbc, 2018).

Selain negara-negara dari Amerika Serikat dan Eropa, negara-negara dari Asia juga merasakan dampak dari gerakan *#MeToo* seperti India. Kasus kekerasan seksual yang dialami jurnalis Priya Ramani oleh Menteri Luar Negeri India Mobashar Jawed Akbar menjadi momentum masuknya gerakan *#MeToo*. Maskulinitas dan budaya patriarki yang ada pada masyarakat India menjadi pencetus dalam seringnya perempuan

India menjadi korban kekerasan seksual. Gerakan *#MeToo* di India mengalami hambatan bukan hanya karena budaya, tetapi penolakan dari masyarakat skeptis terhadap pengakuan korban.

Negara Jepang juga ikut merasakan dampak dari gerakan *#MeToo* melalui media sosial. Kasus kekerasan yang dialami seorang jurnalis televisi terhadap pejabat kementerian keuangan Jepang bernama Junichi Fukuda menjadi momentum bagi gerakan *#MeToo* di Jepang. Munculnya diskusi-diskusi terhadap kekerasan seksual di Jepang juga mengangkat isu dan fenomena *'Tchikan'* yang merupakan aksi pelecehan seksual di dalam kereta api yang merupakan transportasi umum bagi masyarakat, pelaku menjadikan kesempatan tersebut untuk melakukan aksi pelecehan. Budaya seksisme menjadi hambatan bagi gerakan *#MeToo* dalam tujuannya membantu perempuan Jepang melawan segala bentuk kekerasan seksual.

Kemudian Korea Selatan yang juga ikut merasakan dampak dari gerakan *#MeToo* di media sosial. Kasus kekerasan seksual yang dialami seorang jaksa bernama Seo Ji-hyun terhadap Ahn Tae-geun yang juga seorang jaksa menjadi momentum bagi gerakan *#MeToo* di Korea Selatan. Reaksi dan desakan muncul setelah ramainya isu kekerasan seksual yang merugikan korbannya, rendahnya efektivitas dari Undang-undang negara dalam melindungi hak-hak perempuan juga mengangkat isu dan fenomena *'SpyCam'* atau *'Molka'* yang merupakan aksi perekaman tanpa izin yang banyak ditemukan di toilet umum, yang kemudian video korban dibagikan melalui media sosial, korban dari Molka tidak hanya wanita dewasa namun juga anak-anak perempuan (Gunia, 2022).

Gerakan *#MeToo* di Tiongkok

'You are not alone, we see you, we hear you, we here too' adalah slogan gerakan *#MeToo* yang telah menyebar di berbagai negara di dunia melalui media sosial tidak hanya Amerika Serikat. Tiongkok menjadi salah satu negara Asia yang merasakan dampak dari gerakan *#MeToo*.

Hadirnya gerakan *#MeToo* di Tiongkok menyebar dengan berbagai cara seperti :

- a. Melalui media sosial. Gerakan *#MeToo* memanfaatkan media sosial sebagai sarana yang mudah untuk diakses dalam tujuannya menyampaikan betapa besarnya masalah kekerasan seksual. Kasus-kasus yang terungkap melalui media sosial dalam masuknya gerakan *#MeToo* di Tiongkok seperti atlet Tenis Peng Shuai yang menjadi korban wakil perdana menteri Tiongkok Zhang Gaoli.
- b. Melalui kampanye. Gerakan *#MeToo* adalah gerakan anti kekerasan seksual yang juga melakukan kampanye tentang bagaimana kekerasan seksual dapat merugikan korban. Melalui media sosial, kampanye gerakan *#MeToo* tidak hanya melalui aplikasi Weibo tetapi juga twitter, Instagram, Facebook dan Youtube yang dapat diakses melalui *#IAmAlso*, *#MeTooInChina* dan *#Ricebunny*.
- c. Melalui pengadilan. Gerakan *#MeToo* tidak menyediakan penasihat hukum, melainkan karena pengaruh kampanye di media sosial muncul dukungan terhadap penyintas yang membuat terungkapnya kasus-kasus kekerasan seksual yang menempuh jalur hukum seperti kasus kekerasan yang dialami Zhou Xioxuan terhadap Zhu Jun.
- d. Melalui Advokasi kasus. Masuknya gerakan *#MeToo* di Tiongkok menginspirasi penyintas untuk mengungkapkan kekerasan seksual yang

sebelumnya tidak diketahui seperti kekerasan yang dilakukan oleh aktor Tiongkok bernama Kris Wu terhadap seorang perempuan.

Hambatan Gerakan #MeToo di Tiongkok

Hambatan Gerakan #MeToo dari pemerintah Tiongkok

Gerakan #MeToo di Tiongkok menghadapi hambatan besar karena negara membatasi kebebasan berbicara sedangkan Gerakan #MeToo dalam kampanye melawan kekerasan seksual menjadikan bersuara sebagai upaya perlawanan terhadap kekerasan seksual. Tidak hanya membatasi kebebasan berbicara, pemerintah juga membatasi kebebasan dalam menggunakan media sosial juga media massa sedangkan dalam upaya mencapai tujuannya, media sosial dan media massa adalah wadah yang diperlukan untuk kebebasan berekspresi, mobilisasi dan koneksi.

Undang-undang telah mengatur kebebasan berbicara dalam undang-undang konstitusi Tiongkok pada pasal 35 yang berbunyi ‘warga negara Republik Rakyat Tiongkok menikmati kebebasan berbicara, pers, berkumpul, berserikat, prosesi dan demonstrasi’ (Constitute, 2018). Sebagai negara sosialis yang dipimpin oleh partai komunis yang memiliki ideologi mementingkan kepentingan bersama diatas kepentingan individu, penerapan pasal 35 dirasa sulit untuk dilawan oleh gerakan #MeToo di Tiongkok karena pada pasal 51 yang berbunyi ‘pelaksanaan kebebasan dan hak oleh warga negara Republik Rakyat Tiongkok tidak boleh melanggar kepentingan negara, masyarakat dan kolektif, atau terhadap kebebasan dan hak sah warga negara lainnya’ (Constitute, 2018) yang menekankan bahwa masyarakat memiliki kebebasan terbatas dalam mobilisasinya.

Gerakan #MeToo di Tiongkok bergerak melalui media sosial Weibo. Reaksi dan massa yang ditimbulkan oleh gerakan #MeToo di negara-negara lain menginspirasi penyintas di Tiongkok untuk melakukan perlawanan terhadap tindak kekerasan seksual dengan bersuara melalui media sosial, namun perlawanan dan sindiran yang dilakukan tidak sejalan dengan ideologi pemerintah Tiongkok. Pemblokiran dan sensor terhadap #MeToo di media sosial membuat gerakan ini sempat terhenti hingga menimbulkan tagar-tagar lain seperti #IAmAlso, #MeTooInChina dan #RiceBunny yang membuat pemerintah tidak dapat lagi menutupi gerakan perlawanan kekerasan seksual ini. Pemerintah Tiongkok juga mengatur dengan ketat terhadap berita-berita yang dipublikasi dan mengawasi wartawan lokal maupun wartawan asing. Penangkapan hingga hukuman penjara menjadi konsekuensi bagi wartawan yang melanggar aturan.

Hambatan Gerakan #MeToo dari Politik Tiongkok

Ketidaksetaraan gender dalam politik Tiongkok terlihat pada jumlah perempuan tidak sebanding dengan jumlah laki-laki yang berpartisipasi dalam politik. *The Chinese Communist Party* (CCP) sebagai partai yang memegang kekuasaan politik Tiongkok dibawah pimpinan Xi Jinping, Tujuh jabatan dalam komite tetap biro politik pusat partai komunis Tiongkok dan 24 anggota politbiro ditempati oleh laki-laki pada tahun 2022 (Chen, 2023). Sebagai pendiri CCP, Mao Zedong mengutip ‘*Wanita mengangkat setengah langit*’ untuk memperkuat hak-hak perempuan Tiongkok dalam keikutsertaan politik dan sebagai karakteristik yang membedakan dengan negara Tiongkok lama, namun dibawah pimpinan Xi Jinping tidak dapat membuktikan bahwa ketidaksetaraan gender melemah yang bukan dikarenakan kurangnya perempuan yang memilih karier politik namun dominasi laki-laki yang masih sulit dihilangkan yang memperburuk ketidaksetaraan gender dalam kekuasaan negara. Tidak hanya kurangnya keikutsertaan

perempuan dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi perempuan juga dianggap hanya sebagai tenaga kerja cadangan sebagai upaya pembangunan ekonomi Tiongkok yang lebih besar. Kurangnya peran perempuan dalam kekuasaan memiliki konsekuensi dalam bidang politik, ekonomi dan sosial membuat suara perempuan dalam mencapai hak-haknya akan sulit untuk didengar. Ketidaksetaraan gender di negara Tiongkok menjadi hambatan bagi gerakan #MeToo dalam teori feminisme liberal yang menginginkan adanya kesamaan hak antar laki-laki dan perempuan dalam memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Hambatan Gerakan #MeToo dari masyarakat Tiongkok

Dikenal sebagai negara patriarki, Konfusianisme yang merupakan pemikiran filsuf abad ke-6 SM bernama Konfusius menjadi sumber budaya Tiongkok yang telah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakatnya hingga sekarang. Unsur-unsur sifat bijak bagi sesama manusia menurut konfusianisme diharapkan dapat membawa kehidupan yang tertib dan damai bagi pengikutnya. Menurut ajaran konfusianisme, perempuan memiliki kedudukan yang harus patuh terhadap ayah, suami dan anak laki-lakinya jika suaminya telah meninggal dunia. Peran perempuan dalam ajaran konfusianisme sangat dirugikan karena berada dibawah dominasi laki-laki. Bahkan, dalam *Yin – Yang* digambarkan sebagai filosofi yang mendeskripsikan sikap kekuatan, *Yin* digambarkan sebagai energi berwarna hitam, dingin, gelap, air, tanah, bulan dan feminim seperti perempuan, sedangkan *Yang* digambarkan sebagai energi yang putih, hangat, terang, api, matahari dan maskulin seperti laki-laki. Secara tidak langsung, perempuan digambarkan dengan sifat yang pasif sedangkan laki-laki digambarkan dengan sifat yang aktif.

Stigma ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki tetap berlanjut walaupun ajaran konfusianisme telah ditinggalkan di Tiongkok, namun budaya patriarki yang telah ada sulit untuk dihilangkan. Laki-laki menjadi kaum yang superior dan membuat perempuan menjadi kaum yang inferior sehingga menyebabkan perempuan rentan mengalami kekerasan fisik dan non fisik. Serta Budaya Patriarki yang telah lama berkembang dan menjadi sebuah kepercayaan bagi masyarakat Tiongkok menjadi hambatan dalam perlawanan terhadap kekerasan seksual.

Gerakan #MeToo dalam upaya melawan kekerasan seksual dalam teori Feminisme Liberal yang menginginkan adanya komitmen atas revolusi kaum perempuan dalam hal kesadaran guna membentuk kelompok pembebasan terhadap kaum perempuan melihat pemahaman masyarakat Tiongkok berdasar budaya patriarki sebagai sebuah hambatan yang sulit untuk dihilangkan.

Hambatan Gerakan #MeToo dalam melawan kekerasan seksual di Tiongkok

Kekerasan seksual diartikan sebagai segala bentuk pelecehan seksual, pemerkosaan, penghinaan, dan penyerangan yang merusak tubuh, organ reproduksi maupun psikis korbannya.

Gambar statistik kekerasan seksual yang terjadi di kampus Tiongkok



Berdasarkan laporan oleh Universitas Normal Beijing, kekerasan seksual yang terjadi dari tahun 2007 hingga 2016 menunjukkan rendahnya pelaporan terhadap pelaku kekerasan seksual. Korban tidak hanya mahasiswa tetapi professor atau pengajar serta staff kampus. Rendah dan ketidakmauan korban untuk melaporkan dikarenakan rasa malu dan beberapa universitas memilih menutupi kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi untuk menjaga reputasi kampus (Chang, 2017). Dari tahun 2010 hingga 2017 hanya ada 34 kasus yang berfokus pada pelecehan seksual, dan berdasarkan *a June Study by the Beijing Yuanzhong Gender Development Center* dari 34 kasus hanya dua kasus yang dilaporkan oleh korban, dan kedua kasus tersebut akhirnya dibatalkan karena tidak memiliki bukti yang cukup. Sedangkan 32 kasus lainnya adalah kasus yang dilaporkan oleh para pelaku kejahatan seksual yang mengajukan tuntutan pencemaran nama baik setelah tuduhan diungkapkan korban (Richardson, 2018). Berdasarkan *China Youth Daily*, 53% perempuan Tiongkok telah mengalami pelecehan seksual di kereta bawah tanah yang menjadi kendaraan umum di Tiongkok. Dan 1 dari 3 mahasiswi Tiongkok menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual di kampus berdasarkan *China Family Planning Association* (Denton, 2020).

Keterlibatan Pemerintah Tiongkok dalam menangani diskriminasi terhadap perempuan telah dilakukan melalui implmentasi CEDAW yang diharapkan membawa perubahan khususnya dalam menghadapi budaya patriarki. Namun, terbentuknya undang-undang tentang perlindungan hak dan kepentingan perempuan yang telah mengalami amandemen sebanyak 2 kali tidak sepenuhnya diperjuangkan karena pemerintah acuh terhadap aturan yang dibautnya, perempuan Tiongkok masih berada dibawah ketakutannya sendiri karena pemerintah tidak dapat mengendalikan diskriminasi yang terus menerus terjadi.

Gerakan Feminisme di Tiongkok bukan kali pertama dibawa oleh *#MeToo*, *'Feminist Five'* yang dikenal dengan aksi penolakan terhadap diskriminasi perempuan yang dipelopori oleh 5 perempuan asal Tiongkok juga tidak dapat melawan pemerintah karena berhasil ditangkap sebelum melakukan aksi kampanye memperingati hari perempuan internasional. Penolakan yang telah lama dilakukan terhadap gerakan feminisme di Tiongkok adalah jawaban terhadap kekerasan seksual yang sulit untuk diatasi. Para peneliti dari *Yale Law School* menemukan hanya 83 kasus kekerasan seksual dari tahun 2018-2020 yang terdapat dalam kasus perdata pengadilan Tiongkok, dan 77 kasus diantaranya dilaporkan oleh pelaku kekerasan seksual dan hanya 6 kasus yang dilaporkan oleh korban kekerasan seksual itu sendiri (Wu, 2021) Pelaku kekerasan seksual menggunakan situasi *victim blaming* untuk menyelamatkan diri dari tuntutan hukum, dimana situasi tersebut nantinya akan membentuk pandangan publik terhadap

korban, bahwa korban bersalah atas pakaian, waktu maupun tubuhnya. Fenomena ini menjadikan perempuan disalahkan atas kekerasan seksual yang dialaminya.

Pemerintah Tiongkok juga melakukan penolakan atas gerakan *#MeToo* dengan menangkap aktivis feminis yang turut mendukung gerakan *#MeToo*. Sophia Huang Xueqin ditangkap karena dianggap sebagai provokator dalam masuknya *#MeToo* di media sosial Tiongkok. Aksi yang dilakukan Sophia dalam tujuannya untuk mendukung feminisme di Tiongkok menimbulkan mobilisasi dan aksi kolektif yang tidak disukai oleh pemerintah Tiongkok. Keributan di media sosial karena *#MeToo* juga mendorong pelaporan kasus-kasus kekerasan seksual lainnya dengan harapan korban mendapatkan keadilan dan dukungan dari publik maupun pemerintah Tiongkok. Selain Sophia, Aktivis Wang Jianbing juga ditahan karena berperan dalam pelaporan kasus *#MeToo* milik Luo Xixi. Beberapa Aktivis Tiongkok lainnya juga dirampas haknya oleh pemerintah Tiongkok dengan menutup akun media sosial mereka secara paksa.

Pemerintah Tiongkok menampilkan situasi yang berubah-ubah dalam menanggapi kasus-kasus *#MeToo*. Pemerintah Tiongkok dinilai melindungi kaum elit yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual *#MeToo*. Fungsi dari media sosial dan media massa Tiongkok berubah ketika diskusi-diskusi tentang kekerasan seksual yang dialami perempuan Tiongkok dibungkam oleh pemerintah.

Gerakan *#MeToo* dalam upaya perlawanan kekerasan seksual melihat Pemerintah Tiongkok tidak menjembatani tujuan gerakan dalam menolong penyintas. Memiliki pandangan yang bertentangan dengan Feminisme, pemerintah Tiongkok dengan ideologi patriarkal rezim otoriter mempersulit jalan gerakan *#MeToo* dan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan. Gerakan *#MeToo* dalam perlawanan kekerasan seksual juga sulit untuk mendapat dukungan dari politik negara Tiongkok, rendahnya keikutsertaan perempuan dan tidak adanya posisi kepemimpinan yang ditempati oleh perempuan Tiongkok menjadi hambatan besar karena sekali lagi, perempuan berada dibawah kekuasaan laki-laki. Tidak adanya posisi kepemimpinan perempuan di Tiongkok menegaskan bahwa negara tidak dapat menghilangkan ketidaksetaraan gender yang melemahkan posisi perempuan baik dalam politik, ekonomi maupun sosial. Gerakan *#MeToo* juga melihat masyarakat dan pemahamannya adalah tantangan besar dalam terwujudnya perlawanan terhadap kekerasan seksual. Terbiasa dengan budaya patriarki, masyarakat menilai diskriminasi terhadap perempuan bukanlah hal yang penting untuk diatasi. Menyalahkan perempuan atas kekerasan seksual yang terjadi, gerakan *#MeToo* hanya dapat membantu para penyintas juga mereka yang telah menyadari bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah permasalahan yang sama pentingnya dengan masalah lain. Selain masyarakat yang telah hidup bersama budaya patriarki, ketakutan terhadap pemerintah juga menjadi alasan masyarakat enggan berkontribusi dalam penanganan kekerasan seksual, rendahnya pelaporan kasus kekerasan seksual oleh korban sendiri, penangkapan wartawan maupun aktivis menjadi hal yang membatasi gerak penyebaran *#MeToo* sebagai upaya perlawanan kekerasan seksual di Tiongkok, sehingga upaya yang dilakukn oleh gerakan *#MeToo* dalam mengatasi diskriminasi terhadap perempuan Tiongkok sulit untuk diwujudkan.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa gerakan *#MeToo* merupakan gerakan anti kekerasan seksual dan melakukan perlawanan terhadap hal tersebut. Didirikan sejak tahun 2006 oleh Tarana Burke, *Me Too Movement* atau *#MeToo* baru dapat dikenal secara oleh

setelah pengungkapan kasus kekerasan seksual yang dialami Alyssa Milano terhadap Harvey Weinstein. Menjadi inspirasi bagi perempuan lain diberbagai negara tidak hanya Amerika Serikat, gerakan *#MeToo* telah berhasil menjangkau penyintas-penyintas kekerasan seksual dari berbagai negara seperti Prancis, Italia, Inggris, India, Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok. Gerakan *#MeToo* di beberapa negara mengalami hambatan yang cukup besar yaitu penolakan dan sikap skeptis yang muncul dari masyarakat. Gerakan *#MeToo* di Tiongkok juga membuat para penyintas bersuara melawan kekerasan seksual yang dialaminya melalui media sosial, respon pemerintah atas masuknya gerakan *#MeToo* sebagai sebuah gerakan feminis dianggap berlawanan dengan ideologi negara sehingga gerakan *#MeToo* di Tiongkok menghadapi banyak hambatan.

Penelitian ini melihat kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan Tiongkok didasarkan pada kepercayaan pada budaya patriarki yang melihat perempuan adalah kaum yang lemah, dan laki-laki sebagai kaum yang kuat. Budaya yang berkembang pada pemahaman masyarakat Tiongkok menjadikan perempuan sangat dirugikan. Selain itu, pemerintah Tiongkok dengan harapan menghapuskan diskriminasi tersebut juga telah mencoba untuk mengimplementasi CEDAW, hasilnya Tiongkok membuat Undang-undang tentang Perlindungan Hak dan Kepentingan Perempuan. Namun, dalam masuknya gerakan *#MeToo* di Tiongkok, pemerintah melakukan sensor tagar, batasan-batasan ketat terhadap media sosial dan media massa, serta penangkapan aktivis feminisme karena dianggap menimbulkan kericuhan publik dan bertentangan dengan ideologi Tiongkok.

Sehingga, penelitian ini menghasilkan capaian bahwa peranan gerakan *#MeToo* di Tiongkok tidak maksimal karena mengalami hambatan dari budaya patriarki, perbedaan ideologi dan peranan pemerintah dalam membantu mewujudkan tujuan *#MeToo* di Tiongkok.

Daftar Pustaka

- BBC News. 2018. “*#MeToo* : UK Stars give £1m to sexual harassment victim”. Diambil dari BBC News : <https://www.bbc.com/news/uk-45818699>. (Diakses 26 Juli 2023)
- Burke, Tarana. “About Tarana Burke”. Diambil dari <https://www.taranaburke.com/>. (Diakses 25 Juli 2023).
- Chang, Zhang. 2017. Beijing Normal University releases report on sexual harassment on campus. Diambil dari China Development Brief : <https://chinadevelopmentbrief.org/reports/beijing-normal-university-releases-report-on-sexual-harassment-on-campus/>. (Diakses 28 Juli 2023).
- Chen, Minglu. 2023. “where are the women in Chinese politics”. Diambil dari east Asia Forum : <https://www.eastasiaforum.org/2023/05/25/where-are-the-women-in-chinese-politics/>. (Diakses 28 Juli 2023).
- Collins, Lauren. 2018. “Why did Cathrine Deneuve and other prominent French women denounce *#MeToo*?”. Diambil dari The New Yorker : <https://www.newyorker.com/news/daily-comment/why-did-catherine-deneuve-and-other-prominent-frenchwomen-denounce-metoo>. (Diakses 25 Juli 2023).
- Constitute. 2018. “China (people’s Republic of) 1982 (rev.2018)”. Diambil dari : https://www.constituteproject.org/constitution/China_2018. (Diakses 26 Juli 2023).

- Denton. 2017. "Sexual harassment in China". Diambil dari MCLC resource center : <https://u.osu.edu/mclc/2017/10/17/sexual-harassment-in-china/>. (Diakses 28 Juli 2023).
- Eriyanti, Linda Dwi. 2017. "Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dan Perspektif Feminisme". *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol,6 No, 1. 3-6.
- Falciani, Ginevra. 2023. "Why Me Too In Italy is Different?". Diambil dari Worldcrunch : [\https://worldcrunch.com/culture-society/metoo-movement-italy](https://worldcrunch.com/culture-society/metoo-movement-italy). (Diakses 25 Juli 2023).
- Gunia, Amy. 2022. "'It Breaks My Heart.' Confronting the Traumatic Impact of South Korea's Spycam Problem on Women". Diambil dari TIME : <https://time.com/6154837/open-shutters-south-korea-spycam-molka/>. (Diakses 26 Juli 2023).
- Makaarim, Mufti. "memaknai Kekerasan". Elsam Lembaga Studi & advokasi Masyarakat. Dari <https://referensi.elsam.or.id/2014/12/memaknai-kekerasan/>. (diakses Pada 22 Juli 2023).
- P, Utami Zahirah Noviani, dkk. 2018. "Mengatasi dan mencegah tindak kekerasan seksual pada perempuan dengan pelatihan asertif". *Jurnal Penelitian & PPM*. 5(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v5i1.16035>.
- Richardson, Sophie. 2018. "China's victim of sexual harassment denied justice". Diambil dari Human Right Watch : <https://www.hrw.org/news/2018/07/31/chinas-victims-sexual-harassment-denied-justice>. (Diakses 28 Juli 2023).
- Sagala, R.V. 2020. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Indonesia : Geupedia.
- Saxena, Govind dkk. . 2018. "ME TOO MOVEMENT". *Asia Pacific Law & Policy Review*. 4, 294.
- Sina, Parul. dkk. 2017. "Structural Violence on Women: an Impediment to Women Empowerment". *Indian Journal of Community Medicine*. Vol, 42 No, 3. 134-137.
- Sulaiman, Yohanes. 2014. "Menyoal Teori dalam Ilmu Hubungan Internasional". Diambil dari Academia Edu : https://www.academia.edu/34187507/Prolog_Menyoal_Teori_dalam_Ilmu_Hubungan_Internasional. (Diakses 22 Juli 2023).
- Thornman, Sue. 2010. *Teori Feminisme dan Cultural Studies*. Yogyakarta : Jalasutra.
- WHO. 2021. "Devastatingly pervasive : 1 in 3 women globally experience violence". Diambil dari :<https://www.who.int/news/item/09-03-2021-devastatingly-pervasive-1-in-3-women-globally-experience-violence>. (Diakses 21 Juli 2023).
- Wu, Huizhong. 2021. "China's #MeToo victims face abuse, payback for going public". Diambil dari The Diplomat : <https://thediplomat.com/2021/12/chinas-metoo-victims-face-abuse-payback-for-going-public/>. (Diakses 28 Juli 2023).
- Yuqing, Wen. 2018. "Chinese Women, Inspired by #MeToo Movement, Speak Out on Sexual Harassment". Diambil dari Radio Free Asia : <https://www.rfa.org/english/news/china/chinese-women-inspired-by-me-too-movement-speak-out-on-sexual-harassment-03082018122356.html>. (Diakses 21 Juli 2023).